Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan (KEAT)
Volume. 1, No. 1, Maret 2024
e-ISSN : 3046-9414; dan p-ISSN : 3046-8736; Hal 38-52
DOI: https://doi.org/10.61132/keat.v1i4.682
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/KEAT

Implementasi Kebijakan Pembangunan Industri
(Studi Kasus PT Pertamina (Persero))

Linda Fitriani[1*], Pani Dwi Yanti[2], Naerul Edwin Kiky Aprianto[3], Anggi Barnia Safitri[4], Hasnaa U. Annabiilah[5]
[1-5] Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: 224110201029@mhs.uinsaizu.ac.id[1*], 224110201043@mhs.uinsaizu.ac.id[2], naerul.edwin@uinsaizu.ac.id[3], 224110201006@mhs.uinsaizu.ac.id[4], 224110201020@mhs.uinsaizu.ac.id[5]

Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126
**Korespondensi penulis:* 224110201029@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract: *This study examines the implementation of industrial development policies at PT Pertamina (Persero) as a strategic step in supporting national energy security and sustainable development. Referring to the National Industrial Development Master Plan (RIPIN) 2015-2035, this study highlights Pertamina's contribution to energy source diversification, operational efficiency, and strengthening industrial competitiveness. The analysis was conducted using a qualitative method based on literature studies with the Miles and Huberman model approach. The results of the study indicate that the RIPIN policy is implemented effectively through the development of renewable energy technology and increasing the capacity of energy infrastructure. However, several obstacles such as limited infrastructure, technology adoption, and global competition still affect the achievement of policy objectives. This study provides an important contribution in understanding the role of national energy companies in supporting an inclusive and environmentally friendly industrial development agenda.*

Keywords: *industrial development policy, PT Pertamina, energy security, RIPIN.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pembangunan industri di PT Pertamina (Persero) sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, penelitian ini menyoroti kontribusi Pertamina dalam diversifikasi sumber energi, efisiensi operasional, dan penguatan daya saing industri. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RIPIN diimplementasikan secara efektif melalui pengembangan teknologi energi terbarukan dan peningkatan kapasitas infrastruktur energi. Namun, beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, adopsi teknologi, dan persaingan global masih memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran perusahaan energi nasional dalam mendukung agenda pembangunan industri yang inklusif dan ramah lingkungan.

Kata kunci: kebijakan pembangunan industri, PT Pertamina, ketahanan energi, RIPIN.

1. LATAR BELAKANG

Sektor Industri adalah salah satu sektor yang berperan penting pada pembangunan nasional. Sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun memberikan kontribusi yang signifikan. Pada beberapa negara yang tergolong maju, peranan sektor industri lebih dominan dibandingkan sektor pertanian. Sektor industri memegang peran utama sebagai mesin pembangunan, sebab sektor industri mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan sektor lain karena nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar, serta kemampuan membangun nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah (Oghazi et al., 2024).

Received: November 16, 2024; Revised: November 30,2024; Accepted: Desember 10, 2024; Published: Desember 16, 2024

Pembangunan industri menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, upaya pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan prinsip-prinsip keberlanjutan, dengan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tujuan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, yang bertujuan memperkuat struktur industri, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Saat ini, pembangunan industri menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang memengaruhi perkembangan sektor industri dan perekonomian secara keseluruhan (Melinda Wirastiti et al., 2023).

Kebijakan pembangunan industri yang dirumuskan dalam RIPIN menjadi landasan penting bagi pelaku industri, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, implementasi kebijakan pembangunan industri tidak terlepas dari tantangan. Isu ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta adopsi teknologi yang belum optimal menjadi hambatan utama. Selain itu, persaingan global yang semakin ketat menuntut sektor industri untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi (Li et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Peneliti mengkaji penelitian terdahulu mengenai topik yang akan dibahas dalam penelitian ini dan membandingkan dengan penelitian lain. Dibawah ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ade Faisal pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Kebijakan Pembangunan Industri Berbasis Aglomerasi (Kawasan) Industri". Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kawasan industri sebagai strategi pemerataan pembangunan dan peningkatan populasi industri. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pendekatan berbasis kawasan untuk mengoptimalkan nilai tambah dan menarik investasi. Namun, kelemahan dalam penelitian tersebut adalah fokusnya yang cenderung umum pada kebijakan aglomerasi tanpa mengupas secara mendalam implementasi di sektor atau perusahaan tertentu. Sedangkan dalam penelitian kami, pembahasan akan difokuskan pada implementasi kebijakan pembangunan industri pada PT Pertamina (Persero).

Kedua, penelitian yang oleh Melinda Wirastiti pada tahun 2023 dengan judul "Kebijakan Pembangunan Industri dan Lingkungan terhadap Pembangunan Daerah Surabaya", penelitian ini membahas pengaruh kebijakan pembangunan industri pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini menyoroti pentingnya diversifikasi industri, pengembangan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan pengelolaan dampak lingkungan sebagai pilar utama kebijakan pembangunan daerah. Namun, kelemahan dalam penelitian ini

adalah fokusnya yang masih bersifat regional pada Kota Surabaya, sehingga pendekatan kebijakan yang diusulkan kurang mencakup konteks nasional. Sedangkan, dalam penelitian kami berfokus pada studi kasus PT Pertamina, pembahasan lebih diarahkan pada implementasi kebijakan pembangunan industri di tingkat perusahaan nasional.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau kasus tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan studi pustaka atau *literature review*, yang merupakan metode penelitian dengan memperoleh data sekunder dari berbagai sumber pustaka. Studi pustaka ini mencakup analisis teoritis, kajian ilmiah, penelitian terdahulu, serta literatur pendukung lainnya yang relevan dengan tema yang dibahas. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang melibatkan langkah-langkah seperti reduksi data. Melalui teknik ini, data yang diperoleh dianalisis secara mendalam sehingga menghasilkan pembahasan yang relevan dan koheren dengan tema yang dikaji (Sugiyono, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan Pembangunan Industri

Kata "kebijakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai kumpulan konsep dan prinsip yang menjadi fondasi serta kerangka dasar dalam melaksanakan suatu tugas, kepemimpinan, dan tindakan terkait pemerintahan, organisasi, dan lain-lain. Hal tersebut mencakup pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud yang berfungsi sebagai pedoman bagi seorang aktor yang menetapkan kebijakan dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Selaras dengan ungkapan Carl Friedrich yang dikutip oleh (Suharto, 2012) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai hambatan yang ada serta mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut.

Sedangkan menurut (Raviansyah dkk, 2022) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu proses melalui sisi langkah pelaksanaan serta evaluasi sehingga menekankan dengan usulan dan definisi terkait kebijakan lebih optimal apabila arah tindakan selaras dengan adanya usulan tindakan. Artinya bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi permasalahan. Konsep

kebijakan tersebut dianggap tepat dengan alasan terpusatnya perhatian sisi yang sebenarnya dilakukan dan bukan yang diusulkan.

Kebijakan dalam konteks pembangunan industri dapat diartikan sebagai seperangkat keputusan, peraturan, dan tindakan strategis yang dirancang oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk menciptakan kerangka kerja, arah, dan dukungan guna mendorong pertumbuhan, daya saing, dan keberlanjutan sektor industri (Jeshika, 2019). Menurut (Faisal, 2019) kemajuan dan perkembangan sektor industri suatu negara pasti diiringi oleh kebijakan-kebijakan industri yang dikeluarkan oleh pemerintahnya, yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Contohnya adalah negara Korea Selatan dan Taiwan yang sukses mengembangkan sektor industri mereka melalui kebijakan industri yang jelas. Sejak tahun 1960 Pemerintah negara tersebut berkonsentrasi untuk mengembangkan sektor industri melalui kebijakan industri yang sinergis dan mampu memfasilitasi perusahaan di sektor manufaktur, sehingga dapat berkembang dan menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

Kebijakan industri memiliki peran krusial dalam memahami dan menangani dampak eksternal yang signifikan dari aktivitas pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang tepat melalui kebijakan yang dirancang dengan matang. Proses ini memerlukan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan pelaku industri untuk mengidentifikasi hambatan yang ada serta menentukan langkah intervensi yang paling efektif. Selain itu, kebijakan industri tidak hanya fokus pada hasil akhir (*outcome*), tetapi juga memperhatikan cara mengatasi hambatan tersebut melalui proses yang terarah dan kolaboratif (Pramono, 2020).

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alamnya yang melimpah, sehingga menjadikan negara Indonesia memiliki peluang besar untuk maju di sektor industri. Dengan kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor, seperti makanan, tekstil, dan elektronik, Indonesia dapat mengembangkan industri manufaktur yang kuat. Selain itu, lokasi strategis Indonesia dan partisipasi dalam perjanjian perdagangan internasional memberikan akses pasar yang lebih luas untuk produk-produk industri (Purwadinata & Batilmurik, 2024). Pembangunan industri memerlukan perencanaan yang cermat agar dapat dilaksanakan dengan cara yang metodis, komprehensif, berorientasi masa depan, dan terukur. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan menjadikan sektor industri sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian negara. Artinya, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk mendorong pembangunan industri nasional yang terencana.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Kebijakan pembangunan industri nasional yang terencana dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. RIPIN mencakup berbagai regulasi yang dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya secara efisien sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Rencana ini mengatur sejumlah undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap kegiatan industri yang berpotensi merusak lingkungan. Tujuan dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) adalah untuk membangun sektor industri yang mampu daya saing tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki struktur industri Indonesia dengan mengurangi ketergantungan pada ekstraksi dan pengolahan sumber daya alam, serta beralih ke industri yang lebih mengandalkan teknologi dan inovasi (Kementrian Perindustrian, 2015). Dalam RIPIN, fokus utama adalah pada pembangunan industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa tujuan utama dalam RIPIN, yaitu:

a. Meningkatkan Daya Saing Industri, memastikan produk Indonesia dapat bersaing di pasar internasional dan diharapkan untuk mengembangkan sektor-sektor yang fokus pada inovasi, teknologi, dan nilai tambah.
b. Penguatan Struktur Industri dengan mengembangkan sektor industri yang berbasis teknologi tinggi, sehingga ketergantungan pada industri yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dapat diminimalkan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan.
c. Menciptakan industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sehingga kegiatan industri tidak hanya berfokus dalam mencari keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak di masa yang akan datang.

Selain itu, RIPIN telah menetapkan 10 (sepuluh) industri prioritas, penetapan sektor-sektor prioritas ini akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena merupakan sektor penting dalam RIPIN. Industri-industri ini dianggap memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Industri tersebut dikelompokkan ke dalam kategori industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu yaitu sebagai berikut (Kementrian Perindustrian, 2015).

RIPIN memiliki berbagai kebijakan dan inisiatif jangka panjang dalam upaya mencapai tujuan pembangunan industri nasional. Salah satu fokusnya adalah mempromosikan konversi bahan baku lokal menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah hilirisasi, yang juga membantu dalam

pengelolaan sumber daya alam Indonesia secara optimal. Selain itu, RIPIN mendukung kebijakan keuangan dan fiskal yang menguntungkan sektor industri, seperti memberikan keringanan pajak dan pinjaman berbunga rendah untuk industri yang inovatif dan menjanjikan. Implementasi RIPIN untuk mencapai keberhasilan dalam tujuannya juga sangat dipengaruhi oleh pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja Indonesia, khususnya di bidang teknologi dan manufaktur, menjadi prioritas agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara maju (Kementrian Perindustrian, 2015).

Meskipun RIPIN memberikan arah yang jelas untuk pertumbuhan industri Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Indonesia masih menghadapi isu terkait energi, komunikasi, dan transportasi, yang dapat menghambat perkembangan kawasan industri dan pengiriman barang. Selain itu, sektor industri di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru. Penerapan teknologi mutakhir seperti otomatisasi dan digitalisasi masih menjadi tantangan bagi banyak sektor industri. Oleh karena itu, untuk mendukung proses transformasi serta pembangunan industri, meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Selain itu, Indonesia harus bersiap menghadapi persaingan internasional, terutama dari negara-negara lain yang memiliki industri lebih maju dan kapasitas teknologi yang lebih tinggi. Dengan demikian, kebijakan RIPIN harus mampu memanfaatkan pasar internasional dan responsif terhadap perubahan dalam sektor industri global.

Aspek Kebijakan Pembangunan Industri di Indonesia

Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan industri di Indonesia, antara lain :

a. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana yang efektif dan efisien adalah kunci utama dalam pembangunan kawasan industri. Alokasi dana yang tepat guna memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang menguntungkan dan berkelanjutan. Hal ini termasuk penganggaran untuk infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, serta riset dan pengembangan (R&D). Selain itu, transparansi dalam proses alokasi dan penggunaannya juga penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa dana yang ada benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem akuntabilitas yang jelas, pelaporan yang terbuka, serta audit yang rutin adalah beberapa langkah untuk menjaga transparansi (Anisa et al., 2024).

b. Pertimbangan Lingkungan

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan kawasan industri adalah dampaknya terhadap lingkungan. Penggunaan lahan yang luas untuk pembangunan pabrik atau fasilitas industri dapat merusak ekosistem, menghancurkan lahan pertanian, dan mengurangi ruang terbuka hijau. Selain itu, konsumsi air yang besar oleh industri untuk proses produksi juga bisa mengancam sumber daya alam, terutama jika kawasan industri tersebut terletak di daerah yang rawan kekeringan (Ismail, 2016).

c. Pelatihan Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat penting untuk menunjang perkembangan industri. Untuk itu, pelatihan tenaga kerja menjadi salah satu elemen yang sangat diperlukan. Pelatihan ini mencakup peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis, serta penguasaan terhadap teknologi baru. Dengan adanya tenaga kerja yang kompeten, industri akan lebih mampu berinovasi, mengoptimalkan produksi, dan beradaptasi dengan perubahan pasar (Bappeda Kabupaten Lombok Barat, 2016).

d. Diversifikasi Industri

Diversifikasi industri tidak hanya membantu memperkuat ekonomi suatu kawasan, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai lapisan untuk terlibat dalam pembangunan industri. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan golongan ekonomi lemah atau masyarakat di daerah setempat dalam proses pembangunan, baik sebagai tenaga kerja atau pengusaha kecil (Melinda Wirastiti et al., 2023).

e. Infrastruktur

Infrastruktur yang memadai adalah salah satu elemen penting dalam menciptakan kawasan industri yang sukses. Tanpa infrastruktur yang baik, pengiriman barang menjadi tidak efisien, distribusi tenaga kerja terbatas, dan akses ke pasar menjadi sulit. Oleh karena itu, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas energi sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional industri (Melinda Wirastiti et al., 2023).

f. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembangunan kawasan industri membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal kebijakan makro dan pembiayaan, sedangkan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan lahan, izin, serta dukungan logistik dan administrasi yang diperlukan. Sinergi ini memastikan bahwa pembangunan kawasan industri berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada (Brada & Park, 2024).

Pola Kebijakan Pembangunan Industri

Industri biasanya dicirikan dengan mengacu pada hasil utama, misalnya agroindustri, industri mobil,industri perbankan, dll, sebab industri merupakan sekumpulan perusahaan yang mendapatkan barang dagangan maupun produk homogen yang memiliki sifat yang sangat ketat (Oyejobi et al., 2024). Kebijakan industri dapat diterapkan dengan 3 cara yaitu : Pertama, intervensi secara terpilih, pembelaan terhadap usaha yang mengalami penurunan, mendukung pengembangan perusahaan, mendukung organisasi dengan subsidi non permanem, menjunjung strategi baru. Kedua, program umum bagi pelaku usaha pemula dan pengembangan usaha mandiri, mempertahankan inovasi, persiapan professional dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, sejumlah badan didirikan untuk mendukung dan memberikan bantuan keuangan dibidang Pembangunan industri (Kementrian Perindustrian, 2018).

a. Pola Kebijakan Pembangunan Industri Masa Kini

Jika melihat dari perencanaan sektor industri yang ada di berkas perencanaan, maka persoalan pokok yang sering terlihat adalah tidak adanya keterkaitan yang jelas antara strategi dan target serta proyek dan latihan (Miswanto, 2018). Dalam menentukan target terpenting untuk mengenali kondisi pola tanpa mediasi dari inisiatif dan latihan yang didukung wajib pajak. Misanya, kemajuan KIP merupakan petunjuk dari tatanan modern. Masalah lainnya adalah kurangnya upaya terkoordinasi dengan para pelaku bisnis. Berdasarkan penelitian dalam literature, tentu saja strategi modern di Negara-negara maju secara mekanis pada dasarnya mencakup beberapa bisnis (Faisal, 2019). Contoh strategi industri masih belum konsisten dan tidak mendukung kekuatan utama dalam struktur perbaikan. Hal ini menyatakan bahwa kebutuhan akan terciptanya kawasan modern masih belum mempertimbangkan tahapan-tahapan besar sesuai dengan pengalaman (Wasnury et al., 2022).

b. Perbaikan Pola Kebijakan Pembangunan Industri

Untuk menghindari implementasi pola kebijakan yang tidak efektif dan berkelanjutan, beberapa perbaikan dalam pola kebijakan pembangunan industri diperlukan dan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Ghufron, 2018):

1) Dalam menetapkan target, penting untuk mempertimbangkan perbedaan (gap) dari kondisi awal berdasarkan situasi saat ini tanpa campur tangan Pemerintah.
2) Diperlukan penyusunan roadmap pembangunan industri dengan prioritas yang jelas dan jumlah tahapan yang sesuai dengan ketentuan.

3) Industri yang menjadi prioritas difasilitasi agar inovasinya dapat berkembang, seperti pengurangan biaya, peningkatan pendapatan melalui akses pasar yang lebih luas, dan penguasaan teknologi.

Strategi Pembangunan Industri

Berikut strategi yang ditempuh dalam Pembangunan Industri Nasional (Simamora & Andrie Gusti Ari Sarjono, 2022):

a. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
b. Melakukan pembangunan industri hijau;
c. Melakukan pembangunan industri strategis;
d. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
e. Meningkatkan kerja sama internasional bidang industri; dan
f. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).

Dampak Kebijakan Pembangunan Industri

Pembangunan industri memiliki dampak yang cukup besar, baik dari sisi positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampaknya (Melinda Wirastiti et al., 2023):

1) Dampak Positif
   a. Industri mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penarikan investasi.
   b. Kebutuhan industri terhadap infrastruktur memacu pembangunan fasilitas yang juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
   c. Aktivitas industri meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya.
   d. Lapangan kerja dan pendapatan masyarakat yang meningkat berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap layanan dasar.
2) Dampak Negatif
   a. Operasional industri sering menciptakan polusi udara, air, dan tanah yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
   b. Aktivitas industri yang meningkat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan memperparah polusi udara di sekitar kawasan industri.
   c. Keberadaan industri dapat memperbesar kesenjangan sosial jika masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat langsung.
   d. Eksploitasi sumber daya alam untuk kawasan industri mengurangi ketersediaan lahan produktif dan air bersih bagi masyarakat sekitar.

Studi Kasus PT Pertamina (Persero)

PT Pertamina pada awalnya bernama PT Perusahan Minyak Nasional (PERMINA) ketika didirikan pada 10 Desember 1957. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968. Sejak saat itu, Pertamina menjadi perusahaan negara yang bertanggung jawab atas produksi, pengolahan dan distribusi minyak dan gas alam di Indonesia. Pada tahun 2003, melalui Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003, status Pertamina berubah menjadi PT Pertamina, yang beroperasi secara komersial di sektor minyak dan gas bumi dari hulu hingga hilir. Pertamina terus mengalami transformasi dan perubahan strategis seiring waktu. Pada tahun 2006, perusahaan melakukan transformasi fundamental dengan tujuan menjadi perusahaan minyak nasional bertaraf internasional. Visi perusahaan diperbarui pada tahun 2011, yaitu untuk menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia (Amanda et al., 2024).

Perkembangan Pertamina berlanjut pada tahun 2015, dengan terjadi perubahan Anggaran Dasar Pertamina yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan modal, serta memperkuat peran negara dalam perusahaan. Pada tahun 2016 menjadi momen penting dengan adanya perubahan dalam struktur direksi dan dewan komisaris, serta penyesuaian wewenang manajemen dalam pengambilan keputusan. Sejak didirikan, Pertamina telah berkembang menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, berperan krusial dalam menyediakan bahan bakar dan energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta kehidupan masyarakat (Amanda et al., 2024).

Berdasarkan analisis penulis mengenai struktur, perilaku, dan kinerja (Structure, Conduct, and Performance) PT Pertamina (Persero) yang didasarkan pada berbagai referensi dan sumber literatur, dapat disimpulkan bahwa PT Pertamina (Persero) memiliki struktur pasar monopoli alami di sektor hilir energi, terutama dalam distribusi bahan bakar bersubsidi dan gas LPG. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina memegang posisi dominan di pasar, dengan kontrol atas sebagian besar infrastruktur distribusi energi, termasuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jaringan pipa, dan terminal penyimpanan. Ketergantungan pemerintah pada Pertamina untuk penyediaan energi domestik semakin memperkuat posisinya dalam struktur pasar ini. Namun, pada sektor bahan bakar non-subsidi dan gas alam, Pertamina bersaing dengan perusahaan internasional, menjadikannya lebih berfungsi dalam pasar oligopoli di beberapa segmen.

Dalam hal perilaku (conduct), PT Pertamina (Persero) menjalankan kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh regulasi pemerintah yang mengatur distribusi energi, harga bahan bakar, dan alokasi sumber daya. Perusahaan ini berperan sebagai penyedia utama energi untuk sektor industri, rumah tangga, dan transportasi di Indonesia, dan seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan tujuan komersial dengan kewajiban sosial dan pelayanan publik. Misalnya, distribusi bahan bakar bersubsidi yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi melalui program pengembangan energi terbarukan dan pemanfaatan sumber daya domestik. Selain itu, Pertamina juga melakukan berbagai upaya hilirisasi industri energi dengan mengembangkan produk-produk energi yang memiliki nilai tambah tinggi.

Dari sisi kinerja (performance), PT Pertamina menunjukkan hasil yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, meskipun menghadapi berbagai tantangan besar, seperti fluktuasi harga energi global, tekanan untuk berinovasi dengan teknologi baru, dan tantangan lingkungan. Kinerja keuangan perusahaan secara umum stabil, meskipun sering kali dipengaruhi oleh perubahan harga energi internasional dan kebijakan subsidi pemerintah. Dalam hal kinerja operasional, Pertamina telah berhasil mengembangkan sejumlah proyek besar, seperti kilang minyak dan pembangkit energi terbarukan, yang mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industrinya. Secara keseluruhan, PT Pertamina (Persero) terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebijakan, berkontribusi besar terhadap sektor energi Indonesia, dan berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi dinamika global dan domestik.

Implementasi kebijakan pembangunan industri melalui Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) di PT Pertamina bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung pengembangan industri energi yang berkelanjutan. Kebijakan ini mengarah pada peningkatan kapasitas produksi minyak dan gas bumi, pengembangan energi terbarukan, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung sektor energi di seluruh Indonesia. Dengan RIPIN, Pertamina tidak hanya berfokus pada pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga berupaya menciptakan ekosistem industri energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

RIPIN juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, salah satunya dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan bioenergi. PT Pertamina,

melalui kebijakan ini, berkomitmen untuk mengembangkan teknologi dan inovasi yang mendukung transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mencapai target pengurangan emisi karbon yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, kebijakan RIPIN juga mencakup penguatan daya saing industri energi Indonesia di pasar global. Pertamina berupaya meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk, serta memperluas pasar ekspor untuk berbagai produk energi. Melalui kebijakan ini, Pertamina diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi impor energi. Implementasi kebijakan ini juga melibatkan kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi energi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

1) Dampak Positif Kebijakan Pembangunan Industri di PT. Pertamina

Sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia, kebijakan sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dijalankan oleh Pertamina memberikan sejumlah manfaat positif bagi Indonesia, di antaranya (Pangestu & Soesanto, 2023):

a. Sektor migas merupakan kontributor utama penerimaan negara melalui pendapatan dari ekspor minyak dan gas bumi untuk mendukung pembangunan.
b. Minyak dan gas bumi sebagai sumber energi vital dipenuhi oleh Pertamina melalui produksi dan distribusi produk migas untuk kebutuhan transportasi dan energi lainnya.
c. Kebijakan migas Pertamina mendorong kemandirian energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kapasitas produksi domestik.
d. Sektor migas memperkuat investasi dan infrastruktur nasional melalui pembangunan fasilitas pengolahan serta jaringan distribusi migas yang menarik investasi (Wicaksono, 2016).
e. Kebijakan migas meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengelolaan sumber daya efisien, dan efek berganda pada pertumbuhan ekonomi lokal (Purnama, 2022).

2) Dampak Negatif Kebijakan Pembangunan Industri di PT Pertamina

Berikut ini adalah beberapa dampak negatif yang dapat diidentifikasi:

a. Kasus penyalahgunaan kebijakan seperti impor minyak yang tidak transparan menyebabkan kerugian keuangan negara.

b. Insiden tumpahan minyak oleh Pertamina berdampak buruk pada lingkungan, ekosistem laut, kesehatan, dan kehidupan masyarakat pesisir.
c. Aktivitas migas di daerah terpencil sering memperburuk ketimpangan ekonomi akibat distribusi manfaat yang tidak merata.
d. Operasi migas memicu masalah sosial, termasuk konflik dengan masyarakat, keselamatan kerja, dan risiko kesehatan akibat bahan kimia produksi (Pangestu & Soesanto, 2023).
e. Produksi migas menyebabkan kerusakan lingkungan serius, seperti deforestasi, pencemaran, dan penggunaan bahan berbahaya yang berdampak pada ekosistem dan masyarakat (Hermansyah, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi kebijakan pembangunan industri yang terstruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dengan studi kasus PT Pertamina (Persero). Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina memainkan peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) untuk memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi, pengembangan teknologi, dan peningkatan efisiensi operasional. Temuan menunjukkan bahwa Pertamina berhasil memenuhi kebutuhan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan melalui inisiatif energi terbarukan. Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, persaingan global, serta kebutuhan adaptasi terhadap teknologi baru.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi pada infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan adopsi teknologi mutakhir menjadi langkah krusial untuk mendukung transformasi sektor energi. Dengan strategi yang terintegrasi, PT Pertamina diharapkan dapat terus menjadi penggerak utama dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang ramah lingkungan, sekaligus memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Amanda, R., Putri, S. A., Arifan, Y. N. M., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Optimalisasi proses operasional dengan menggabungkan teknologi IoT dan big data: Studi kasus pada PT Pertamina dalam industri minyak dan gas. Economics and Business Management Journal (EBMJ), 3(1), 1–10.

Anisa, S. N., Aulia, S., Indah, A., Dipa, M. A. K., & Panorama, M. (2024). Analisis peran infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan di Kota Palembang. Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi, 4(1), 36–54. https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435

Bappeda Kabupaten Lombok Barat. (2016). Rencana induk pembangunan industri kabupaten (RIPIK) (Issue 0370).

Brada, J. C., & Park, J. (2024). The fourth industrial revolution: Implications for the global economy and for the strategic competition between the United States and China. Asia and the Global Economy, 4(2), 100097. https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2024.100097

Faisal, A. (2019). Analisis kebijakan pembangunan industri berbasis aglomerasi (kawasan) industri. Bappenas Working Papers, 2(2), 248–269. https://doi.org/10.47266/bwp.v2i2.44

Ghufron, M. A. (2018). Revolusi industri 4.0: Tantangan, peluang dan solusi bagi dunia pendidikan. 328–337.

Hermansyah, B. A. (2022). Dampak industri minyak dan gas terhadap lingkungan. Jurnalpost. https://jurnalpost.com/dampak-industri-minyak-dan-gas-terhadap-lingkungan/41677/

Ismail, Y. (2016). Environmentally friendly industrial estate development policy (eco-industrial park). Journal of Management Studies, 1(1), 33–52.

Jeshika. (2019). Perkembangan industri nasional menuju industri tangguh 2035. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 8(1), 1766–1775.

Kementerian Perindustrian. (2015). Rencana induk pembangunan industri nasional 2015–2035. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015–2035, 1–98.

Kementerian Perindustrian. (2018). Kebijakan industri, perdagangan, dan fasilitas industri.

Li, G., Jiang, M., Yuan, Y., Chen, X., & Fu, D. (2024). The nexus of poverty energy in China's industrial productive efficiency and energy transition in digital economy. Heliyon, 10(14), e34247. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34247

Melinda Wirastiti, Syahrizal Zebua, Aditya Arga Widhyasa, & Muhammad Yasin. (2023). Kebijakan pembangunan industri dan lingkungan terhadap pembangunan daerah Surabaya. Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 2(1), 119–126. https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.143

Miswanto, S. (2018). Pariwisata. Jurnal Nasional Pariwisata, 10(April), 14–21.

Oghazi, P., Mostaghel, R., & Hultman, M. (2024). International industrial manufacturers: Mastering the era of digital innovation and circular economy. Technological Forecasting and Social Change, 201(January), 123160. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123160

Oyejobi, D. O., Firoozi, A. A., Fernández, D. B., & Avudaiappan, S. (2024). Integrating circular economy principles into concrete technology: Enhancing sustainability through industrial waste utilization. Results in Engineering, 24(July). https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102846

Pangestu, T. S., & Soesanto, E. (2023). Sektor migas di perusahaan Pertamina. Jurnal Mahasiswa Kreatif, 1(4), 25–38.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. In Kebijakan Publik.

Purnama, S. (2022). Industri hulu migas dorong penciptaan kesejahteraan ekonomi di daerah. Antaranews. https://www.antaranews.com/berita/2885177/industri-hulu-migas-dorong-penciptaan-kesejahteraan-ekonomi-di-daerah

Purwadinata, S., & Batilmurik, R. W. (2024). Persoalan kebijakan isu kontemporer dan globalisasi pembangunan. In PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Raviansyah dkk. (2022). Kebijakan publik. In PT. Global Eksekutif Teknologi. http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf

Simamora, J., & Andrie Gusti Ari Sarjono. (2022). Urgensi regulasi penataan ruang dalam rangka perwujudan pembangunan berkelanjutan. Nommensen Journal of Legal Opinion, 03, 59–73. https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611

Sugiyono. (2020). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D.

Suharto, E. (2012). Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Alfabeta.

Wasnury, R., Paramitha, A., & Promalessy, R. (2022). Strategi pengembangan industri kecil menengah (IKM) yang berdaya saing pada saat COVID-19 di Kota Pekanbaru. JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan), 18(2), 63. https://doi.org/10.31258/jip.18.2.63-70

Wicaksono, P. E. (2016). Ini dampak positif dari pembentukan holding migas. Liputan6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/2577100/ini-dampak-positif-dari-pembentukan-holding-migas